

RESUME HASIL PENELITIAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA BOGOR



Nama Peneliti:

1. Prof. Sadu Wasistiono, MS
 2. Dr. Megandaru Widhi Kawuryan, M.Si
 3. Agung Nurrahman, S.STP, M.PA
 4. Ikhbaluddin, S.IKom, M.Si
 5. Irfan Uluputy, S.STP, M.Si
 6. Fahril Yau
 7. Lungki Melen Nalova
 8. Husna Latifah
-

PRODI TRIP
LEMRISKA - IPDN
TAHUN 2022

Abstrak

Smart City merupakan konsep yang cukup hangat untuk dibahas, terutama bagi negara Indonesia yang tengah mengembangkan hal tersebut. Namun, konsep tersebut tidaklah lahir di ruang hampa yang lepas dari persoalan, diantara problematika perkembangan konsep smart city adalah pergeseran makna dari definisi sempit yang selalu merujuk pada teknologi, menuju definisi yang lebih luas. Lebih jauh lagi implementasi dari konsep smart city dengan definisi yang luas tersebut juga masih menemui cukup banyak kendala, diantaranya adalah dengan minimnya riset mengenai hal tersebut dalam skala nasional. Adapun untuk kota bogor merupakan lokus yang menarik untuk dilakukan riset terhadapnya dikarenakan terdapat setidaknya beberapa faktor. Pertama, dari hasil analisa aplikasi Vosviewer didapati bahwa belum terdapat riset yg memadai mengenai konsep smart city dgn definisi luas di Kota tersebut. Kedua, didapati dari beberapa pernyataan dari kepala daerah dengan indikasi pemahaman konsep smart city yang sempit. Ketiga, Kota Bogor merupakan bagian dari kota besar yang memiliki kebijakan mengenai smart city, oleh karenanya perlu diketahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Terdapat beberapa temuan dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: Pertama, peneliti menilai pada aspek implementasi kebijakan, secara umum sudah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan dari sejumlah dimensinya yang baik, masih terdapat kekurangan pada dimensi SDM, anggaran, stabilitas struktur birokrasi pelaksana dan turunannya seperti hubungan dan Kerjasama antara organisasi pelaksana. Kedua, pada aspek *smart governance* dinilai cukup baik. Hal tersebut dikarenakan dari sekian dimensi yang cukup baik masih terdapat beberapa kekurangan pada dimensi lain, seperti keterlibatan masyarakat dan akademisi. Ketiga, strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor diantaranya adalah melakukan perancangan sistematika karir pegawai secara linier dengan program smart city, kemudian mbingkai hal tersebut dalam suatu regulasi, adapun setiap tahapan tersebut selalu dikonsultasikan dengan masyarakat dan akademisi beserta dengan penelusuran modal indeks kebahagiaan masy.

Keywords: Implementasi Smart City, Smart Governance, Kota Bogor

Abstract

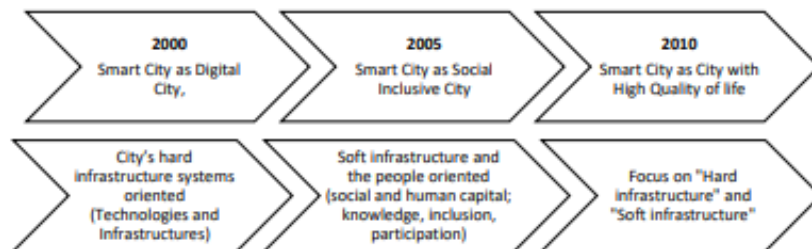
Smart City is a fairly hot concept to discuss, especially for the Indonesian state that is developing this. However, the concept was not born in a vacuum that free from problems, among the problems of the development of the smart city concept is the shift in meaning from a narrow definition that always refers to technology, towards a broader definition. Furthermore, the implementation of the smart city concept with a broad definition also still encounters quite a lot of obstacles, including the lack of research on this matter on a national scale. As for the city of Bogor, it is an interesting locus to do research on it because there are at least several factors. First, from the results of the Vosviewer application analysis, it was found that there has not been adequate research on the concept of a smart city with a broad definition in the city. Second, it was found from several statements from regional heads with indications of understanding the narrow concept of smart cities. Third, Bogor City is part of a big city that has a policy regarding smart cities, therefore it is necessary to know how the policy is implemented. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. There are several findings from this study, including the following: First, researchers assess that in the aspect of policy implementation, in general, it is quite good. This is because from a number of good dimensions, there are still shortcomings in the dimensions of human resources, budget, stability of the implementing bureaucratic structure and its derivatives such as relationships and cooperation between implementing organizations. Second, in the aspect of smart governance, it is considered quite good. This is because of the many dimensions that are quite good, there are still some shortcomings in other dimensions, such as community involvement and academics. Third, strategies that can be carried out by the Bogor City government include designing employee career systematics linearly with the smart city program, then framing this in a regulation, while each of these stages is always consulted with the public and academics along with tracing the capital of the community happiness index.

Keywords: Smart City Implementation, Smart Governance, Bogor City

Pendahuluan

Terdapat beberapa riset yang menunjukkan bahwa konsep *smart city* tidaklah sesempit itu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aspek teknologi hanyalah merupakan bagian dari dimensi *smart city*. Lebih jauh lagi, dimensi lain lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari masyarakat. Misalnya saja pada penelitian Arafah dan Winarso¹ ditunjukkan bahwa terdapat evolusi dari konsep *smart city*, dimana pada tahun 2000an identik dengan konsep *digital city*, namun akhirnya pada tahun 2010-an didefinisikan sebagai ukuran kualitas hidup yang tinggi.

Gambar 1 : Perkembangan konsep smart city



Lebih jauh lagi, di era perkembangan filsafat barat *post-modernism* ini, *anthropocentrism* menjadi salah satu poros pemikirannya, oleh karenanya *consensus* menjadi salah satu prinsip atau kaidah utamanya. Pada konsep *smart city*, seperti yang disampaikan pada riset Camero² belum terdapatnya suatu *consensus* mengenai hal ini. Salah satu factor perbedaan diantaranya adalah mengenai pemusatan pada perkembangan teknologi sebagai indicator utama. Hal tersebut sebenarnya telah dikritik Heidegger³ jauh-jauh hari dengan banyak mempertanyakan tentang esensi dan perkembangan teknologi yang telah banyak menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat.

Adapun disamping penelitian tersebut (yang secara particular memberikan gambaran yang lebih luas, sekaligus menunjukkan kontradiksi pada beberapa aspek, juga menunjukkan reduksi penggunaan konsep *smart city* pada derajat tertentu), peneliti telah mencoba melakukan ekstensifitas pada aspek penelitian mengenai topik tersebut dengan menggunakan aplikasi VOSVIEWER agar mendapatkan gambaran yang lebih luas, yakni sebagai berikut:

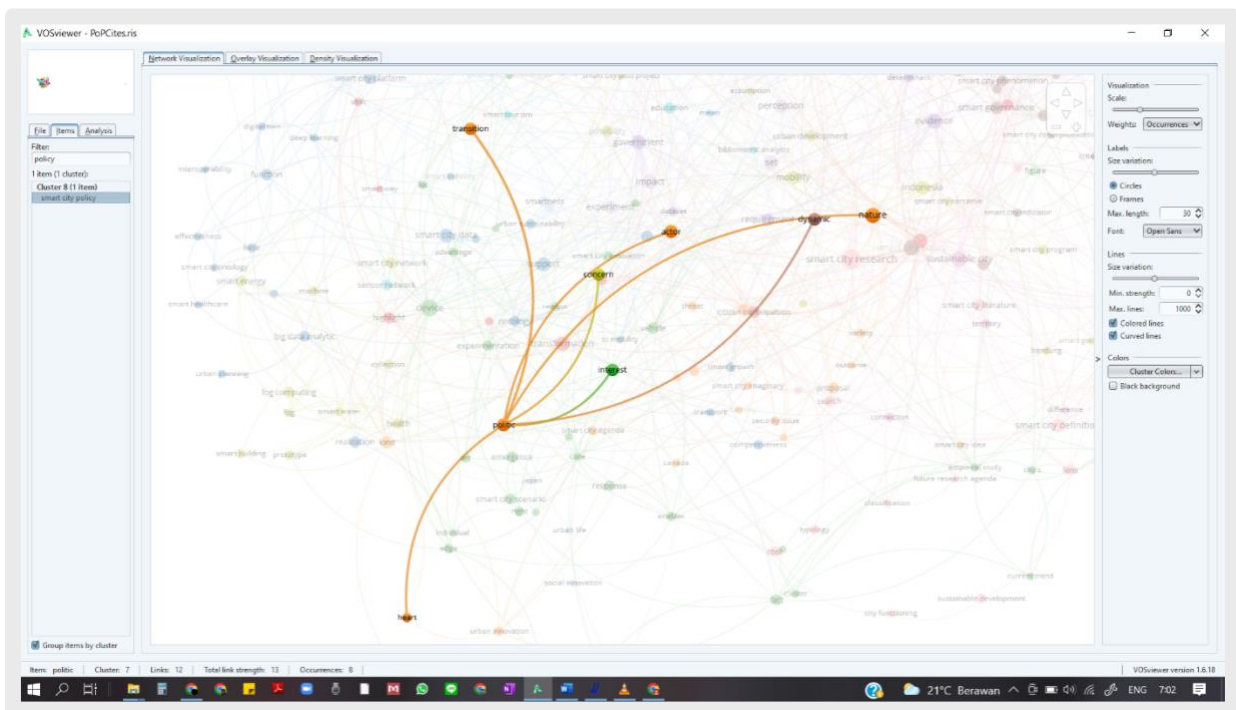
¹ H. Arafah, Y., & Winarso, "Redefining Smart City Concept with Resilience Approach," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (2017).

² Andrés Camero and Enrique Alba, "Smart City and Information Technology: A Review, *Cities*," *Elsevier* 93 (2019): 84–94.

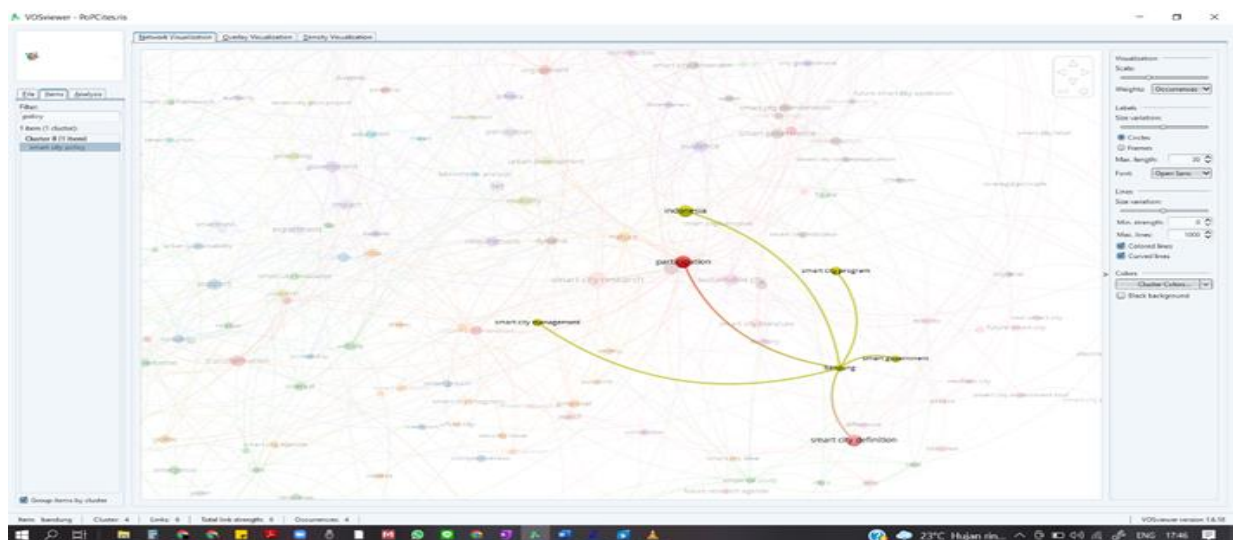
³ Martin Heidegger, *The Question Concerning Technology*, ed. Harper & Row New York William Lovitt (New York, 1977).

Terdapat beberapa hal yang peneliti memaknai dari hasil olahan aplikasi tersebut. Pertama, masih cukup terbatasnya kajian *smart city* secara umum, lebih khusus lagi konsep tersebut identik dengan konsep *digital city*.⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa bias definisi masih terjadi cukup jamak, yang juga terkait dengan data kepadatan penelitian.⁵ Untuk mengetahui kecenderungan dari pemaknaan awal ini, peneliti kemudian mencari tahu lebih lanjut dengan mencari korelasi kebijakan, politik, dan konsep *smart city*.

Gambar 2 : Korelasi Kajian *Smart City*-Kebijakan-Politik



Gambar 3 : Lingkup penelitian mengenai kebijakan smart city



⁴ Lihat gambar 1 dan 2

⁵ Lihat gambar 3

Disamping masih terjadinya kecenderungan dan kekerapan reduksi pemaknaan dari konsep *smart city*, hasil dari analisa VOSVIEWER menunjukkan bahwa efek tersebut sampai hingga tataran kebijakan dan politik. Dapat ditarik pemaknaan dari hasil tersebut⁶ bahwa kekeliruan (tidak salah secara mutlak, namun aspek ketepatan pendefinisian menjadi factor kritis dalam hal ini) pada tataran konseptual (yang tentunya filosofis) berpengaruh terhadap kebijakan yang dilahirkan. Lebih jauh lagi, peneliti menyatakan bahwa kecenderungan kebijakan yang diambil sejauh ini masih *digital city oriented*, dimana kebijakan yang diambil baik secara sadar ataupun tidak, masih menitikberatkan pada konsep tersebut.

Hal tersebut peneliti nyatakan demikian dikarenakan diperlukannya kemampuan berfikir secara kritis untuk mengadopsi suatu konsep secara umum, lebih khusus lagi untuk diterapkan sebagai suatu kebijakan. Misalnya terkait hal tersebut, adalah diperlukannya penilaian atau *assessment* terhadap kondisi lapangan untuk melakukan penerapan konsep *digital city*. Sebagai hal yang particular atau khusus, bahwasanya negara maju saja yang dianggap paling layak untuk menerapkan konsep ini, mulai melakukan revisi baik dari tataran konseptual *smart city* dan juga pada tataran penerapan kebijakannya. Seperti diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Angelidou mengenai penerapan yang lebih bersifat spasial karena dinilai lebih sederhana, mudah dalam manajerial, dan pencapaiannya, disamping pencapaian secara kategorisasi akan sangat berpengaruh pada daerah penerapannya.⁷

Perkembangan revolusi industri saat ini memasuki revolusi industri 4.0, yang lebih dikenal dengan hadirnya internet dalam aktivitas manusia. Pada revolusi industri 1.0, dunia mengenal teknologi kereta mesin uap, ditandai dengan terjadinya proses ekspor impor besar besaran baik orang maupun barang. Selanjutnya revolusi industri 2.0, ditemukan listrik dan lampu. Sementara, revolusi industri 3.0, didasarkan pada penemuan komputer berupa seperangkat alat teknologi yang bisa menyimpan dan mengolah data secara digital. Perkembangan smart city pada era revolusi industri 4.0 identik pada visi pengembangan perkotaan, untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi Internet of things (IoT), dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota.

Pada tahun 1990-an, perusahaan IBM mencetuskan konsep smart city. Berbagai negara telah mengembangkan smart city di dunia. Pemerintah metropolitan Seoul juga telah mengambil langkah lebih lanjut untuk memasang 50.000 sensor pintar IoT yang tertanam di seluruh kota pada tahun 2020 untuk mengumpulkan data kehidupan kota termasuk polusi, tingkat kebisingan, lalu lintas, getaran, sinar UV dan lain sebagainya. Singapura mulai meluncurkan program Smart Nation pada tahun 2014 dengan melibatkan pemasangan sensor di sekitar kota untuk mengambil sejumlah besar informasi tentang apa yang dilakukan warga setiap hari. Dengan cara ini mereka dapat mengukur seberapa bersih suatu area hingga seberapa ramai suatu acara. Sementara

⁶ Lihat gambar 2-3

⁷ Margarita Angelidou, "Smart City Policies: A Spatial Approach," *Cities* 41 (2014): S3–S11.

yang juga dipengaruhi dengan adanya universitas seperti ITB dan Telkom University. Adapun untuk Kabupaten Sumedang belum ditemukan data yang cukup mengenai penggunaan dan penerapan konsep *smart city*. Adapun untuk Kota Bogor memiliki kecenderungan tinggi dalam menerapkan konsep *Smart city* ala *digital city* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut juga dikuatkan dengan penjelasan mengenai hal tersebut yang menyoal dana IT dan SDM terkait pengembangan teknologi.⁹ Lebih jauh lagi Kota Bogor merupakan permisalan dari Studi kasus yang cocok mengingat telah terdapatnya dokumen-dokumen kebijakan yang dapat diakses public dan menjadi salah satu sorotan utama peneliti untuk mengkaji salah satu dimensi dari konsep *Smart City*, yakni dimensi *Smart governance* yang merupakan dimensi utama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan persoalan kebijakan dan politik. Oleh karena itu peneliti mengambil Judul Kontekstualisasi Konsep *Smart City* di Kota Bogor sebagai judul dari penelitian kelompok ini.

Adapun peneliti merumuskan masalah penelitian berdasarkan pembatasan masalah sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *smart city* di Kota Bogor?
2. Bagaimana penerapan konsep *smart governance* di Kota Bogor?
3. Bagaimana strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam menerapkan kebijakan *smart city*?

Adapun peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan *smart city* di Kota Bogor?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan konsep *smart governance* di Kota Bogor?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam menerapkan kebijakan *smart city*?

Giffinger et.al menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) dimensi dari smart city, yaitu smart economy, smart mobility, a smart environment, smart people, smart living, and smart governance..¹⁰Tak jauh berbeda dengan Giffinger, Rubel¹¹ menjelaskan bahwa smart governance dikaji melalui tingkat partisipasi masyarakat, transparansi informasi dan Kolaborasi. Rubel¹² menjelaskan bahwa partisipasi warga melibatkan publik dalam perbaikan keputusan. Berikutnya adalah transparansi informasi pada penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi. Sementara Kolaborasi merupakan elemen penting dilakukan dan didalamnya terdapat layanan kepada publik yang meliputi

⁹ Gumanti Awaliyah, "Pemkot Bogor Belum Maksimal Wujudkan Smart City," *Republika*.

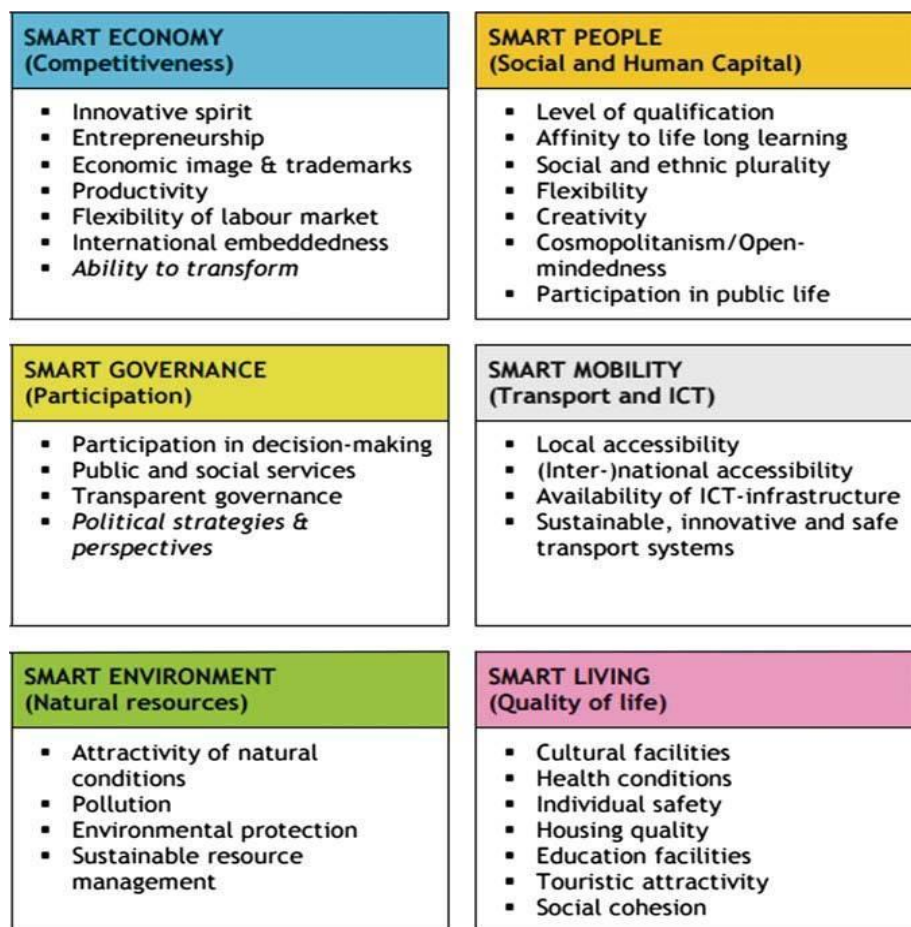
¹⁰ Giffinger et al., *Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities*.

¹¹ Rubel, "Smart Governance : Studi Kasus Pada Pelayanan Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (2017).

¹² Ibid.

warga negara dan institusi pemerintah. Sementara menurut Schuurman¹³ menegaskan bahwa smart governance dinilai sebagai proses pengumpulan dari sekumpulan data dan informasi yang berisikan manajemen publik. Hal ini didukung oleh pendapat dari Pratama (2014) yang menjelaskan bahwa smart governance terdiri atas partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas dan jumlah layanan publik serta terdapatnya database yang terstruktur.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan dimensi smart governance pada pendapat Giffinger¹⁴ yang menyampaikan secara jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 10 :
Smart City menurut Giffinger¹⁵

Berdasarkan gambar tersebut, Giffinger menyatakan bahwa smart governance terdiri atas 4 (empat) dimensi, yaitu: *participation in decision making, public and social*

¹³ Dimitri Schuurman et al., "Smart Ideas for Smart Cities: Investigating Crowdsourcing for Generating and Selecting Ideas for ICT Innovation in a City Context," *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 7 (2012), <https://www.mdpi.com/0718-1876/7/3/25>.

¹⁴ Giffinger et al., *Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities*.

¹⁵ Ibid.

service, transparant governance, dan political and strategic perspective. Giffinger mengelompokkan dimensi smart governance dalam beberapa bagian, yaitu:

1. *Participation in decision making* (Pengambilan keputusan Partisipatif)

Pengambilan keputusan Partisipatif merupakan proses pemberian kepemilikan keputusan kepada seluruh kelompok secara kreatif dengan menemukan pilihan yang efektif untuk dijalankan semua orang.

2. *Public and Social Services* (Pelayanan Publik dan Sosial)

Pelayanan sosial meliputi tunjangan dan fasilitas seperti perawatan kesehatan, bantuan makanan, pendidikan, Dinas Pemadam Kebakaran, perumahan bersubsidi, perawatan kesehatan, adopsi, pelatihan kerja, lobi, penelitian kebijakan, dan pengelolaan masyarakat

3. *Transparent Governance* (Tata Kelola Transparan)

Tata kelola yang transparan berarti pejabat pemerintah tidak menyembunyikan apapun terhadap masyarakat dan bertindak secara terbuka dengan diketahui oleh warga negara terkait keputusan yang akan diambil.

4. *Political Strategis & Perspective* (Perspektif dan strategi politik) Strategi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan baik dari segi pengaruh maupun kredibilitas untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi konflik¹⁶

Peneliti memilih dimensi yang disampaikan oleh Giffinger¹⁷ dikarenakan konsep *smart city* yang digunakan cenderung lebih luas daripada sekedar *digital city*. Lebih jauh lagi, apa yang disampaikan olehnya bersesuaian dengan persoalan yang ditemui oleh peneliti, yaitu pada aspek kebijakan dan politik yang pada kedua hal itu dirangkum olehnya menjadi suatu dimensi *smart governance*. Adapun hal tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada kerangka pemikiran dibawah ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam Teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan analisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Selanjutnya peneliti merumuskan strategi menggunakan SOAR Analysis dan litmus test.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Oki Tri F. N. A selaku Kepala Bidang E-Government, ada beberapa system yang mendukung infrastruktur pelayan publik dan sosial salah satu contohnya, melalui system pengaduan. Pada tahun ini sudah tidak melakukan, tetapi pada tahun sebelumnya kita menampung berita media sosial yang

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

dikeluhkan masyarakat, melalui media online. Hasil analisa, masyarakat memberikan jawaban. Namun, tidak jadi faktor utama. Pemerintah bekerja dengan perhitungan yang susah dimengerti masyarakat umum yang sudah terprogram, terencana dalam renstra/rkpdp yang harus dilaksanakan. Meskipun tidak begitu signifikan, karena tidak terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat. Apa yang menjadi pilihan pemerintah tidak begitu saja mengabaikan, justru input tersebut menjadi sangat berharga untuk perbaikan system. Contohnya, layanan perpajakan ada PBB, dilakukan secara print out manual yang berisi kewajiban atas hutang pajak. Pada saat masyarakat memiliki pbb dan hilang, minta lagi ke kantor pajak akan muncul tagihan baru, padahal dalam hal yang sama.

Penyaluran dan pemungutan yang sering menjadi masalah oleh kolektor. Muncul inisiatif untuk digitalisasi, dengan memunculkan SPPT online yang jika diprint 100x pun tidak menimbulkan pajak baru., biaya print tidak ditanggung pemerintah, tidak ada lagi permasalahan penyaluran, fee tanda terima. Masyarakat keberatan dengan digitalisasi, Karen lupa email atau tidak bias mendownload. Keluhan masyarakat muncul, permasalahan secara konvensional, ditampung dan ditindaklanjuti untuk membuat sppt online diganti secara digital untuk menghilangkan kolektor.

Dengan kerjasama bersama 26 payment online berupa bank, lembaga jasa keuangan atau lembaga jasa non keuangan kita buat kemudahan dengan tujuan uang angsum masuk ke daerah tanpa melalui masyarakat. Namun, ada saja pandangan masyarakat bahwa harus ke bank, harus ke indomaret. Tetapi banyak masyarakat yang suka dengan pola seperti ini. Riak-riak kecil yang tidak lebih dominan dijadikan sebagai masukan untuk evaluasi dan monitoring. Kebutuhan masyarakat besar harus terus digenjot. Dari masyarakat banyak dapat atensi dan penghargaan (data mentah ke ibu yani keluhan aplikasi dan media lainnya, apakah diizinkan akses masuk akun?). pernah menemui Pak Andi Sekretaris Lurah berkenan memberi akses masuk, namun tidak bisa. Contoh TND online. Jika TND hanya aparatur, jika NIK tidak dikenali database tidak dapat masuk. TND tidak lock email dan NIK, murni hanya username dan psw. Data Smart City sudah diunggah dalam website.

Berdasarkan Buku Masterplan Smart City Kota Bogor hal 71, Pemerintah Kota Bogor telah Merancang Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City* yang tertuang dalam table berikut ini:

Diskominfo sebagai leading sector bagi penyelenggaraan smart city di Kota Bogor telah melakukan upayanya yang tergambar dalam capaian realisasi kebijakan smart city. Pada bidang Jaringan, Domain dan Persandian Diskominfo menyediakan Wifi Publik yang terletak pada titik Diskominfo sejumlah 62 titik, Pemerintah Provinsi Jabar sejumlah 6 titik dan totalnya 68 titik. Selain itu juga telah diterapkan sertifikat elektronik yang digunakan oleh 365 pengguna. Layanan aplikasi publik yang tersedia dalam rangka penerapan smart government di Kota Bogor. Fiber optic dan wireless telah tersebar sejumlah 123 titik Fiber Optic se-Kota Bogor dan terdapat 12 Wireless. Sementara itu untuk CCTV terdapat sejumlah 71 titik CCTV eksternal.

Pada bidang informasi dan komunikasi public memfokuskan pada pengelolaan media komunikasi publik yaitu media sosial, radio streaming Sipatahunan, dan SPTV. Selain itu juga melakukan kemitraan media komunikasi bersama Advertorial dan Jumpa

Pers. Sedangkan untuk pengelolaan dan penyediaan informasi dilakukan melalui PPID, SiBadram Pengelolaan Media Sosial dan Sipatahunan.

Pada bidang statistic Sektoral memfokuskan pada Portal Data, Buku Data dan Buku Induk. Portal Data Statistik Sektoral (data.kotabogor.go.id) merupakan website yang memungkinkan pengguna mencari, mengeksplorasi, menghubungkan, men-download, dan menggunakan data secara bersama-sama dengan perlengkapan visualisasi data yang menarik. Buku Metadata Statistik Sektoral tahun 2021 menyajikan berbagai keterangan dan informasi mengenai identitas data sektoral yang meliputi urusan kepegawaian, kependudukan, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dihimpun dari beberapa perangkat daerah Kota Bogor. Buku Induk Statistik merupakan publikasi untuk menyediakan wadah referensi yang berisi data-data sektoral dari produsen data, baik OPD maupun instansi vertikal di Kota Bogor.

Berikut merupakan aplikasi yang diperuntukkan dalam rangka mendukung Percepatan Penanggulangan Covid 19 di Kota Bogor:

- 1) Publikasi Data Covid 19 yang dapat diakses melalui covid19kotabogor.id, diperuntukkan bagi Publik dan Pemerintah. Tujuannya adalah untuk transparansi data Covid 19, sosialisasi, edukasi, pemberitaan, penyebarluasan produk hukum daerah.
- 2) Detektif Covid 19 melalui dev.kotabogor.go.id yang diperuntukkan bagi Tim Surveilans. Aplikasi ini bermanfaat sebagai bank data tracing dan tracking kasus covid 19 oleh Dinas Kesehatan dan Tim Surveilans.
- 3) Peta sebaran Covid19 dapat diakses melalui covid19kotabogor.id/peta-v2 yang diperuntukkan bagi public. Sebagai transparansi data sebaran Covid-19 di Kota Bogor berdasarkan wilayah RW, kelurahan dan kecamatan.
- 4) Web admin Covid-19 diperuntukkan bagi admin, sebagai proses create, read, update dan delete database Covid-19.
- 5) Sistem kolaborasi dan solidaritas untuk Rakyat (Salur) melalui salur.kotabogor.go.id yang bertujuan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.
- 6) Salur gugus tugas Covid 19 Kota Bogor melalui salurgtc.kotabogor.go.id sebagai aplikasi yang mencatat bantuan masuk dan keluar melalui Gugus Tugas Covid 19 Kota Bogor disertai dengan dokumentasinta.
- 7) Jaga Asa Keluarga Asuh melalui jagaasakotabogor.go.id sebagai aplikasi penerimaan donasi kepada keluarga terdampak pandemic Covid 19 Kota Bogor.
- 8) Jejak @Bogor dan Jejak Venue yang merupakan aplikasi berbasis android dan IOS yang berfungsi sebagai alat tracing, tracking, early warning system covid 19 dan memberikan ruang promosi bagi venue.

Berkaitan dengan penerapan smart governance, Pemerintah Kota Bogor memiliki E-Menanduk (2018-sekarang) yang terealisasi 1 Aplikasi untuk Pengajuan Pencetakan e-KTP, KK, dan KIA (Terealisasi 100%). Selain itu terdapat Mall Pelayanan Publik Grha

Tiyasa (2019-sekarang) - Lippo Plaza Keboen Raya dimana 1 MPP dengan 14 instansi dan 145 layanan.

Pemerintah Kota Bogor juga melakukan Transformasi Layanan Dukcapil (Disdukcapil) yaitu Implementasi SOP baru untuk pelayanan kependudukan kepada masyarakat secara lebih maksimal dan terpadu. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 9.



**Transformasi Layanan
Dukcapil (Disdukcapil)**

Selain itu terdapat BisKita Kota Bogor 10 unit Biskita Transpakuan Layanan angkutan umum massal dengan konsep Bus Rapid Transit (BRT) melalui subsidi berbasis skema Buy The Service (BTS) di Kota Bogor. Penambahan Volume Pedestrian Pajajaran Kota Bogor Di Sepanjang jalan Pajajaran Kota Bogor hingga Mall Lippo Kebun Raya Dengan Jarak Pedestrian Pajajaran 3 Km, Penambahan Volume Pedestrian Lawang Surya Kencana Di sepanjang jalan pasar bogor hingga ujung jalan surya kencana Dengan Jarak Pedestrian Lawang Surya Kencana 1,2 Km, Penambahan Jalur Sepeda Jalan Djuanda Di sepanjang jalan Djuanda Mall BTM hingga SMAN 1 Bogor. Jalur pedestrian sepanjang 825 meter, Penambahan Jalur Sepeda Pajajaran Kota Bogor Di Sepanjang jalan Pajajaran Kota Bogor hingga Mall Lippo Kebun Raya Dengan Jarak Pedestrian Pajajaran 3 Km, Pembangunan Alun-Alun Kota Bogor Terintegrasi yang didirikan di Lahan eks Taman Topi atau Taman Ade Irma Suryani, dengan Luas 1,7 Hektar.

Aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo adalah Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Kota Bogor. Selain itu terdapat Aplikasi Sibadra Kota Bogor, Website Resmi

Diskominfo, Portal Data Kota Bogor, Website Resmi Covid-19 Kota Bogor yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:.

Gambar 10.



Tampilan Website Resmi Pemerintah Kota Bogor

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Oki Tri F. N. A selaku Kepala Bidang E-Government, Pemerintah kota bogor sudah tidak bekerja sama dengan pihak penyedia layanan telkomsel/ indosat atau penyedia layanan wireless. Karena Kota Bogor sendiri telah membangun infrastruktur seperti pemasangan kabel optic, dari pusat ke titik pemasangan hingga ke puskesmas dan sudah memiliki nomor ISP sendiri. Dalam pemeliharaan jaringan pada kabel optik, dan juga penggantian perangkat jika ada kerusakan, infrastruktur kota bogor sudah melakukan internet personal service. Untuk infrastruktur umum telah digunakan perda power bersama dengan tujuan sekitar tahun 2019 sudah 0 pertumbuhan kota bogor, mewajibkan power bersama. Yang digunakan provider telekomunikasi bukan lagi penggunaan tower besar seperti backbone atau repeater, yang dibutuhkan hanya tower mini atau microsell. Penyelenggaraan perwali dalam pembuatan dan pemasangan mikrosell. Tentunya dengan ketentuan pendampingan mengenai apa CSR yang terpenuhi apa yang bisa diberikan ke kota bogor.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Oki Tri F. N. A selaku Kepala Bidang E-Government, Diatur dalam Undang-Undang dan diatur dalam keputusan Kepala Komisi Informasi. Dalam hal ini, jika masyarakat mmebutuhkan infomrasi mengenai bagaimana keterbukaan terhadap publik. Dapat diakses melalui website Kota Bogor, Diskominfo, Bappeda.

Secara Khusus, untk melihat keterbukaan informasi melalui website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kota Bogor. Dikarenakan setiap tahun telah mengikuti penilaian indeks keterbukaan informasi publik seperti RKA dan DPA. Berikut ini adalah tampilan beranda awal website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kota Bogor:



Gambar 11.

Website PPID Kota Bogor

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Oki Tri F. N. A selaku Kepala Bidang E-Government, Pencegahan korupsi tidak sebentar, jika menggali evidensinya pun berat. Kita sudah menjadi binaan kosupga KPK jauh sebelum KPK dibentuk. Kota boogor menjadi kota pertama yang menjadi pilot project kosupga. Koordinasi pencegahan korupsi langsung dari kpk yang termasuk dalam pihak eksternal dalam pengembangan egov smartcity di kota bogor. Contohnya: pendampingan kosupga untuk melakukan efisiensi anggaran, efektifitas kerja, kebocoran, perencanaan lebih akuntabel, keuangan akuntabel dan terarah. Di tahun 2014 menerapkan simeral perencanaan (system informasi manajemen perencanaan khusus) secara online dg kerjasama dengan bppt. Pada saat pendampingan, salah satu poin kpk, perencanaan digital harus terintegrasi dengan perencanaan anggaran dengan system bpkp. Dorongan itulah yang menjadikan dorongan integrasi perencanaan tata kelola keuangan dan pertanggung jawaban keuangan, sehingga diintegrasikan dalam perencanaan kota bogor dalam musrenbang di tingkat kelurahan sampai level kesakip keuangan. Dari segi pencegahan korupsi, kota bogor mendapatkan pendampingan langsung kota bogor dari segi perencanaan dan penganggaran belum dari pengelolaan pendapatan daerah. dari segi pengawasan ditop up dari belum mengenal maturitas menjadi yang maturitas level 3. Banyak sekali pencegahan yang dilakukan pendampingan KPK dari 2013. Hasilnya kita memiliki egov

dan smartcity, ekosistem kpk. (dokumen dipegang orang dinamis, coba minta ke inspektorat pengawasan).

Merujuk hasil wawancara pada informan penelitian, dasar kebijakan penerapan smart city dan smart governance di Kota Bogor merujuk pada kebijakan e-government karena wujud dari e-government adalah terwujudnya Pemerintah Kota yang menyelenggarakan smart city dalam penyelesaian permasalahan perkotaan.

Kesimpulan

Pada aspek penerapan Smart Governance di Kota Bogor secara umum peneliti mendapati bahwa hal tersebut dinilai cukup. Kesimpulan tersebut kami dapati berdasarkan dari jumlah dan kualitas keterjawaban setiap dimensi yang digunakan. Pemerintah Kota Bogor memiliki banyak sisi positif dari aspek penyelenggaraan pemerintahan secara administrative, khususnya dalam pemanfaatan Teknologi dan Informasi. Adapun pada dimensi-dimensi yang menilai keterlibatan dari pihak-pihak lain, diantaranya seperti elemen masyarakat dan para akademisi, masih terdapat beberapa kekurangan. Dengan demikian kami menilai bahwa sisi kelebihan dan kekurangan berbanding secara hampir seimbang, walaupun sisi positif hampir lebih dominan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut, yaitu: Pertama, perlunya pemerintah Kota Bogor untuk lebih mencermati celah-celah instabilitas dalam struktur birokrasi khususnya mengenai hal-hal yang dianggap cukup signifikan sebagai pendorong dan penghambat keberjalanan program smart city, Kedua, persoalan mengenai hal tersebut secara khusus dan juga mengenai hal umum lainnya akan sangat lebih baik jika mampu didudukkan Bersama untuk dibahas Bersama para akademisi untuk kemudian dituangkan dalam suatu produk hukum yang memiliki kekautan untuk mengikat para implementor kebijakan smart city dan smart governance. Ketiga, mengingat sebenarnya seluruh tujuan dari manajerial ini adalah pada dasarnya kebahagiaan masyarakat, maka tentunya elemen masyarakat perlu dilibatkan secara lebih intens dalam perumusan kebijakan, sehingga terdapat sinkronisasi yang dapat menjadi booster pencapaian *smart governance* di Kota Bogor.

Daftar Pustaka

- Angelidou, Margarita. "Smart City Policies: A Spatial Approach." *Cities* 41 (2014): S3–S11.
- Arafah, Y., & Winarso, H. "Redefining Smart City Concept with Resilience Approach." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (2017).
- Awaliyah, Gumanti. "Pemkot Bogor Belum Maksimal Wujudkan Smart City." *Republika*.
- Baykurt, Burcu, and Christoph Raetzsch. "What Smartness Does in the Smart City: From Visions to Policy." *Sage Journal: Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies* (2020).
- Boeje, Henni. *Analysis in Qualitative Research*. London: Sage Publication, 2010.
- Bryson, J.M. *Strategic Planning for Public and Non-Profit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, 3a Ed.* San Francisco: Jossey Bass, 2004.
- Camero, Andrés, and Enrique Alba. "Smart City and Information Technology: A Review, Cities." *Elsevier* 93 (2019): 84–94.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Falconer, Gordon, and Shane Mitchell. *Smart City Framework A Systematic Process for Enabling Smart+Connected Communities*, 2012.
- Fatih, Andy Al. *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Universitas Padjajaran Press, 2010.
- Flick, Uwe. *Introducing Research Methodology -A Beginner's Guide to Doing A Research Project*. London: Sage Publication, 2011.
- Giffinger, Rudolf, Christian Fertner, Hans Kramar, and Robert Kalasek. *Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities*. Vienna University of Technology, 2007. https://www.researchgate.net/publication/261367640_Smart_cities_-_Ranking_of_European_medium-sized_cities.
- Griffel, Frank. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Ed.)*, 2016.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press, 1980.
- Haack, Susan. "1. 'Philosophy of Logics'". *Philosophy of Logics*. London and New York: Cambridge University Press, 1978.
- Harrison, Colin, and Ian Abbott Donnelly. "A Theory of Smart Cities." In *Proceedings Of The 55th Annual Meeting Of The Isss*. Hull-UK, 2011. <https://journals.iss.org/index.php/proceedings55th/article/view/1703>.

- Heidegger, Martin. *The Question Concerning Technology*. Edited by Harper & Row New York William Lovitt. New York, 1977.
- Howlett, Michael, and M. Ramesh. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- K.Yin, Robert. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press, 2011.
- Lail, Lutfianah. "Implementasi Kebijakan Smart City Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta." Universitas Brawijaya, 2017.
- Lopes, Nuno Vasco. "Smart Governance: A Key Factor for Smart Cities Implementation." In *2017 IEEE International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC)*. Singapore: IEEE, 2017.
- Luankali, Bernadus. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press, 2007.
- Marsal, M.L-Llacuna, J. Colomer-Llina` S, and J. Mele´ndez-Frigol. *Lessons in Urban Monitoring Taken from Sustainable and Livable Cities to Better Address the Smart Cities Initiative*, 2014.
- Meter, Donald S. Van, and Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* (1975). <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/009539977500600404>.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Newbury Park. CA: Sage Publication, 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Nam T. and Pardo, A. "Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People and Institutions." Center for Technology in Government, University of Albany, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nurdiassa, Annisa, Achmad Zulfikar, Fatmawati Rasyid, and Andi Tika Wulandari. "Implementasi Kebijakan Smart City Dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia." *Journal of Public Administration and Government* 3, no. 1 (2021).
- Pereira, Gabriela Vialea, Petera Parycek, Enzoc Falco, and Reinoutc Kleinhans. "Smart Governance in the Context of Smart Cities: A Literature Review." *Information Polity* 23, no. 2 (2018).
- Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.

- Rahmadanita, Annisa, Eko Budi Santoso, and Sadu Wasistiono. "Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 44, no. 2 (2018): 81–106.
- Razaghi, Mohamad, and Matthias Finger. "Smart Governance for Smart Cities." In *Proceedings of the IEEE Volume 106 Issue 4*. IEEE, 2018.
- Reddick, Akemi Takeoka Chatfield Christopher G. "Smart City Implementation Through Shared Vision of Social Innovation for Environmental Sustainability: A Case Study of Kitakyushu, Japan." *Sage Journal: Social Science Computer Review* (2015).
- Ripley, Randall B., and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago, Illinois: The Dorsey Press, 1986.
- Rubel. "Smart Governance : Studi Kasus Pada Pelayanan Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bone." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (2017).
- Sari, Devi Novita, Dia Zulfia Rahmadani, and Mohamad Yusuf Wardani. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City." *Journal of Governance Innovation* 2, no. 2 (2020).
- Scholl, H. J., and M. C. Scholl. "Smart Governance: A Roadmap for Research and Practice." In *IConference 2014 Proceedings*. iSchools, 2014.
- Schuurman, Dimitri, Bastiaan Baccarne, Lieven De Marez, and Peter Mechant. "Smart Ideas for Smart Cities: Investigating Crowdsourcing for Generating and Selecting Ideas for ICT Innovation in a City Context." *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 7 (2012). <https://www.mdpi.com/0718-1876/7/3/25>.
- Sedarmayanti, and Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama, 2012.
- Solichin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Kebijakan Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sri Suwitri. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Stavros, Dr. Jacqueline M., and Dr. Matthew L. Cole. "SOARing Towards Positive Transformation and Change." *The ABAC ODI Visions.Action.Outcome* 1, no. 1 (2013). https://www.mcole-psy.com/mcole/Cole-publications/StavrosCole2013_SOARing_Towards_Positive_Change.pdf.
- Stavros, J., and G. Hinrichs. *Thin Book of SOAR Building Strength-Based Strategy*. Thin Book Publisher, 2009.

- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Su, K., J. Li, and H. Fu. "Smart City and the Applications." In *2011 International Conference on Electronics, Communications and Control (ICECC)*. Ningbo, China: IEEE, 2011.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutopo, HB. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UN Press, 2006.
- Wasistiono, Sadu, and Fernandes Simangunsong. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press., 2015.
- Zygiaris, S. "Smart City Reference Model: Assisting Planners to Conceptualize the Building of Smart City Innovation Ecosystems." *J Knowl Econ* (2013).